

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2017**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA PEKANBARU**

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan dan menindaklanjuti surat dari Walikota Pekanbaru Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2017. Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2017 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan Kota Pekanbaru.

Pekanbaru, 31 Desember 2017
KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA PEKANBARU,

M. ZULFIKRI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620621 199003 1 007

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tahun 2017 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Pembentukan perangkat daerah ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bidang lingkungan hidup juga termasuk persampahan yang meliputi pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Oleh karena itu, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru atau disingkat DLHK Kota Pekanbaru merupakan penggabungan dari tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dan sebagian Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2017 – 2022 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang memuat 1 (satu) pernyataan Visi, 5 (lima) pernyataan Misi yang diemban, serta 5 (sasaran) yang harus dicapai pada akhir tahun 2017. Sesuai Penetapan Kinerja (TAPKIN) tahun 2017 yang telah disusun terdapat 10 (Sepuluh) Program Utama serta 41 (empat puluh satu) kegiatan yang harus dicapai /dilaksanakan, dengan dukungan anggaran DPA-SKPD Tahun 2017 sebesar **Rp. 60.123.745.612,00-** termasuk belanja pegawai, setelah dilakukan penambahan anggaran sebesar **Rp. 7.348.807.561,00** sehingga DPPA-SKPD Tahun 2017 menjadi sebesar **Rp. 67.472.553.173,00-** termasuk belanja pegawai.

Dari evaluasi kinerja secara mandiri (*Self assesment*), dari 10 program utama yang ditetapkan seluruhnya dikategori indikator kinerja dan ada beberapa kegiatan yang masih diperlukan upaya perbaikan/ penyempurnaan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Pencapaian Target Perjanjian Kinerja

1. Program pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
 - 1) Penyediaan jasa surat menyurat
 - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - 5) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - 6) Penyediaan alat tulis kantor
 - 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 9) Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan
 - 10) Penyediaan makanan dan minuman.
 - 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
 - 1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - 2) Pengadaan peralatan gedung kantor
 - 3) Pengadaan mebeleur
 - 4) Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:
 - 1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
4. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
 - 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 2) Penyusunan laporan keuangan semesteran
 - 3) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
 - 1) Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
 - 2) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
 - 3) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
 - 4) Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
 - 5) Bimbingan teknis persampahan
 - 6) Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
 - 7) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
 - 8) Pengembangan dan Penataan Tempat Pembuangan Akhir Sampah
6. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
 - 1) Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
 - 2) Pemantauan Kualitas Lingkungan
 - 3) Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
 - 4) Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
 - 5) Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
 - 6) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
 - 1) Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
 - 2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
8. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
 - 1) Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Hidup
 - 2) Pengembangan data dan informasi lingkungan
9. Program Peningkatan Pengendalian Polusi, Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
 - 1) Pengujian emisi kendaraan bermotor
 - 2) Pengujian kadar polusilimbah padat dan limbah cair
 - 3) Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
 - 1) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan

Kendala Yang Dihadapi

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja, kami menyadari bahwa pencapaian tingkat kinerja belum maksimal. Hal ini disebabkan adanya beberapa kendala, antara lain:

1. Re-organisasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
2. Masih rendah dan terbatasnya kualitas sumberdaya aparatur baik perencana dan teknis dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan;
3. Minimnya sarana dan prasarana persampahan (Armada, TPS, TPST).
4. Beberapa kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tidak dilaksanakan dikarenakan terjadi rasionalisasi anggaran.

PENGUKURAN KINERJA ANGGARAN TAHUN 2017

Pada tahun anggaran 2017 OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2017 berjumlah **Rp. 67.472.553.173,00-** terdiri dari :

1. Belanja Langsung **Rp 60.902.597.810,00-**
2. Belanja Tidak Langsung **Rp. 6.569.955.363,00-**

Dari anggaran tersebut diatas terealisasi sampai dengan akhir tahun 2017 sebesar **Rp. 57.178.023.047,00-** (84,74%) , - terdiri dari :

1. Belanja Langsung **Rp. 52.139.962.420,00-**
2. Belanja Tidak Langsung **Rp. 5.038.060.627,00-**

Terhadap realisasi anggaran yang hanya sebesar 84,74 %. Sedangkan Terhadap realisasi fisik yang hanya sebesar 90 %.

BAB - I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Nama *Pekanbaru* dahulunya dikenal dengan nama "*Senapelan*" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut *Batin*. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan.



Kemudian perkampungan *Senapelan* berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut *Dusun Payung Sekaki* yang terletak di tepi muara sungai Siak.

Nama *Payung Sekaki* tidak begitu dikenal pada masanya melainkan *Senapelan*. Perkembangan *Senapelan* berhubungan erat dengan perkembangan *Kerajaan Siak Sri Indrapura*. Semenjak Sultan *Abdul Jalil Alamudin Syah* menetap di *Senapelan*, beliau membangun istananya di

Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan *Senapelan*. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar *Mesjid Raya* sekarang. Sultan *Abdul Jalil Alamudin Syah* mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di *Senapelan* tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda *Muhammad Ali* di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri *Senapelan* diganti namanya menjadi "**Pekan Baharu**" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan *Senapelan* sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "**PEKAN BAHARU**", yang dalam bahasa sehari-hari disebut **PEKANBARU**.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut :

1. SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut *District*.
2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang *Controleur* berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut *Gokung*, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh *Gunco*.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kota b.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.

8. Kepmendagri No. Desember 52/II/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya.
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.

Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan luas sekitar 632.26 km² dan secara astronomis terletak di antara 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara dan 101° 14' – 101° 34' Bujur Timur. Di bagian utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak, di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan, di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar, sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar. Selain berada di tengah Provinsi Riau, Pekanbaru juga berada di lintasan jalur transportasi darat Pulau Sumatera. Hal ini menyebabkan Pekanbaru mempunyai lokasi yang strategis, dan akan semakin strategis seiring dengan perkembangan pembangunan di wilayah Sumatera maupun perkembangan di Malaysia dan Singapura.

Kota Pekanbaru mempunyai topografi yang bervariasi, yaitu landai, berombak sampai bergelombang, dengan geologi lahan terdiri dari endapan *alluvium* muda yang terbentuk akibat pengangkutan dan pengendapan sisa-sisa bahan induk oleh aliran sungai. Lahan jenis ini mempunyai karakteristik yang rentan terhadap gangguan alami maupun pengolahan lahan yang berlebihan. Sebagian lahan Kota Pekanbaru juga mempunyai ciri *formasi minas* yang karakteristiknya lebih baik namun memiliki kandungan mineral lempung kaolinit yang mempunyai sifat porositas tanah rendah, yang dapat menahan senyawa aluminium, sehingga tanah bersifat asam dan sangat korosif terhadap material logam. Akibat kondisi geologi ini jenis tanah di Kota Pekanbaru bervariasi, antara lain *alluvial hidromorf*, *alluvial* coklat kekuningan, *alluvial* kelabu dan tanah-tanah yang berasosiasi, yaitu perpaduan dua jenis tanah yang sulit dibedakan.

Sebagaimana daerah tropis lainnya, Pekanbaru mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Pada tahun 2004 jumlah hari hujan di Kota Pekanbaru sebanyak 209 hari, dengan curah hujan rata-rata 306,39 mm dan temperatur berkisar antara minimum 26,9° C sampai dengan maksimum 29,3° C (Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Tahun 2004).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pekanbaru 2012-2016 8 Secara administrasi pemerintahan Kota Pekanbaru dikepalai oleh Walikota, yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 dimekarkan dari 8 wilayah administrasi kecamatan menjadi 12 wilayah administrasi Kecamatan. Wilayah administrasi Kecamatan selanjutnya terbagi lagi menjadi Kelurahan, yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003, dimekarkan dari 50 wilayah administrasi kelurahan menjadi 58 wilayah administrasi kelurahan.

Wilayah administrasi kelurahan terbagi lagi menjadi 539 Rukun Warga (RW) dan 2.266 RT (Rukun Tetangga). Populasi penduduk Kota Pekanbaru sampai dengan Tahun 2012 menurut Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru mencapai 1.290.890 jiwa, dengan demikian tingkat kepadatan penduduk Kota Pekanbaru lebih kurang 2.041,7 jiwa/km².

1.1. Penggunaan Lahan

Wilayah Kota Pekanbaru berkisar 632,26 Km². Pemerintah kota Pekanbaru pada tahun 1993 telah memiliki Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) yang dituangkan dalam Perda No.4 tahun 1993, Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) pada Kawasan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pekanbaru 2007-2011* 27 sebagian Wilayah Kecamatan Tampan dengan ketetapan Hukum Perda No.5 tahun 1993, Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) kawasan Rekreasi Lembah Sari (Perda No.6

tahun 1993), RTRK sebagian Kawasan Kecamatan Senapelan (Perda No.10 tahun 1993, RTRK sebagian Kawasan Kecamatan Tampan (Perda No.11 tahun 1993) dan RTRK sebagian Kawasan Kecamatan Bukitraya (Perda No.9 tahun 1993).

Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Daerah No.3 tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan baru dari 8 Kecamatan menjadi 12 Kecamatan dan Perda 4 tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan baru dari 50 Kelurahan menjadi 58 Kelurahan, untuk mengantisipasi pemekaran wilayah Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2006 melakukan Revisi RUTRK untuk seluruh wilayah Kota Pekanbaru dan menyusun RDTRK pada Kawasan Wilayah Pembangunan IV (Kecamatan Tampan, Marpoyan Damai dan Payung Sekaki).

Tabel. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan.

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	%	Penduduk	%	Kepadatan	%
		(km2)		(jiwa)		(jiwa/km2)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sukajadi	3,76	0,59	52.989	6,60	14,093	
2	Pekanbaru Kota	2,26	0,36	30.092	3,75	13,315	
3	Senapelan	6,65	1,05	37.614	4,69	5,656	
4	Sail	3,26	0,52	22.335	2,78	6,851	
5	Limapuluh	4,04	0,64	42.759	5,33	10,584	
6	Tampan	59,81	9,46	106.160	13,22	1,775	
7	Marpoyan Damai	29,74	4,70	127.369	15,87	4,283	
8	Payung Sekaki	43,24	6,84	74.439	9,27	1,772	
9	Bukit Raya	22,05	3,49	87.586	10,91	3,972	
10	Tenayan Raya	171,27	27,09	102.494	12,77	598	
11	Rumbai	128,85	20,38	51.772	6,45	402	
12	Rumbai Pesisir	157,33	24,88	67.179	8,37	427	

1.2. Karateristik Kependudukan

- Populasi (2012) : 980.000 jiwa
- Populasi (2018) : 1.290.980 jiwa (proyeksi)
- Jumlah kepadatan : 2.041,7 jiwa/km2
- Jenis kelamin : laki-laki = 49,68 %
Perempuan = 50,32%
- Usia tengah : 32 tahun
- Lulusan perguruan tinggi : 13.87 %
- Lulusan pendidikan dasar : 37.32 %
- Upah minimum regional :Rp. 1.980.000,-

Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.

Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Jumlah mereka yang cukup besar, telah mengantarkan Bahasa Minang sebagai salah satu bahasa pergaulan yang digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru selain Bahasa Melayu atau Bahasa Indonesia.

Selain itu, etnis yang memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota, namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau. Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja *romusha* dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun perkembangan kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti di luar kota namun banyak juga yang beralih okupasi.

Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, membuka banyak peluang pekerjaan, hal ini juga menjadi pendorong berdatangnya masyarakat Batak. Kelompok etnik ini umumnya bekerja sebagai karyawan, dan memiliki ikatan emosional yang kuat terutama jika semarga dibandingkan kelompok etnis lain yang ada di Kota Pekanbaru. Pasca PRRI eksistensi kelompok etnis ini menguat setelah beberapa tokoh masyarakatnya memiliki jabatan penting di pemerintahan, terutama pada masa Kaharuddin Nasution menjadi *Penguasa Perang Riau Daratan*.

Sementara masyarakat Tionghoa dengan rata-rata bakat *entrepreneur* yang kuat menguasai perdagangan skala besar di Kota Pekanbaru. Kopi Kim Teng saat ini menjadi *trademark* kopi asal Pekanbaru, yang dirintis oleh Kim Teng, seorang veteran pejuang Tionghoa masa kemerdekaan di Pekanbaru.

Tahun	1930	1954	1961	1971	1990	2000	2010	2016	2017
Jumlah penduduk	2.990	28.314	70.821	145.030	398.694	587.842	897.768	1.064.566	1.091.088

1.3. Ekonomi

1.3.1. Kondisi Perekonomian Daerah

Pertanian	: 1,53 %
Listrik, Gas dan Air Bersih	: 2,27 %
Bangunan	: 13,87 %
Industri pengolahan	: 6,58 %
Kuangan	: 13,62 %
Pengangkutan dan komunikasi	: 13,69 %
Jasa – Jasa	: 18,57 %
Perdagangan, hotel dan restoran	: 29,83 %
Pertambangan dan penggalian	: 0,05 %

Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik *pulp* dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0.79%, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0.30%. Berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi hampir pada semua kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang pada triwulan laporan tercatat mengalami deflasi masing-masing sebesar 0.88% dan 0.02%. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru pada bulan Maret 2010 tercatat sebesar 2.26%, terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu 2.07% pada bulan Januari 2010 dan 2.14% pada bulan Februari 2010.

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru, telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern, diantaranya: Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal SKA, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Ramayana dan Giant. Walau di tengah perkembangan pusat perbelanjaan modern ini, pemerintah kota terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada dapat bertahan, di antaranya dengan melakukan peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Beberapa pasar tradisional yang masih berdiri, antara lain Pasar Bawah, Pasar Raya Senapelan (Pasar Kodim), Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar Limapuluh dan Pasar Cik Puan. Sementara dalam pertumbuhan bidang industri di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,82 %, dengan kelompok industri terbesar pada sektor industri logam, mesin, elektronika dan aneka, kemudian disusul industri pertanian dan kehutanan. Selain itu beberapa investasi yang ditanamkan di kota ini sebagian besar digunakan untuk penambahan bahan baku, penambahan peralatan dan perluasan bangunan, sebagian kecil lainnya digunakan untuk industri baru.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA APARATUR

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Pembentukan perangkat daerah ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, DLHK Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok membantu Walikota Pekanbaru dalam memberikan pelayanan umum dengan pelayanan teknis di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan di Kota Pekanbaru, DLHK Kota Pekanbaru harus mampu merespon dan mengatasi berbagai persoalan lingkungan hidup dan kebersihan dengan langkah-langkah yang strategis agar dapat memenuhi harapan masyarakat luas, yaitu terwujudnya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru. Pelestarian fungsi lingkungan hidup dapat diwujudkan apabila pengelolaan lingkungan hidup diterapkan dalam pembangunan (*sustainable development*).

Tugas dan Fungsi Kepala DLHK Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru terdiri dari :

1. Kepala DLHK Kota Pekanbaru, mempunyai rincian tugas :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- 2) Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- 3) Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- 4) Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- 5) Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- 6) Pelaksanaan urusan bidang kehutanan sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- 7) Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 8) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup dinas;
- 9) Pembinaan, Pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- 10) Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- 11) Pengelolaan keuangan dinas;
- 12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala DLHK dalam melaksanakan rincian tugas menyelenggarakan fungsi :

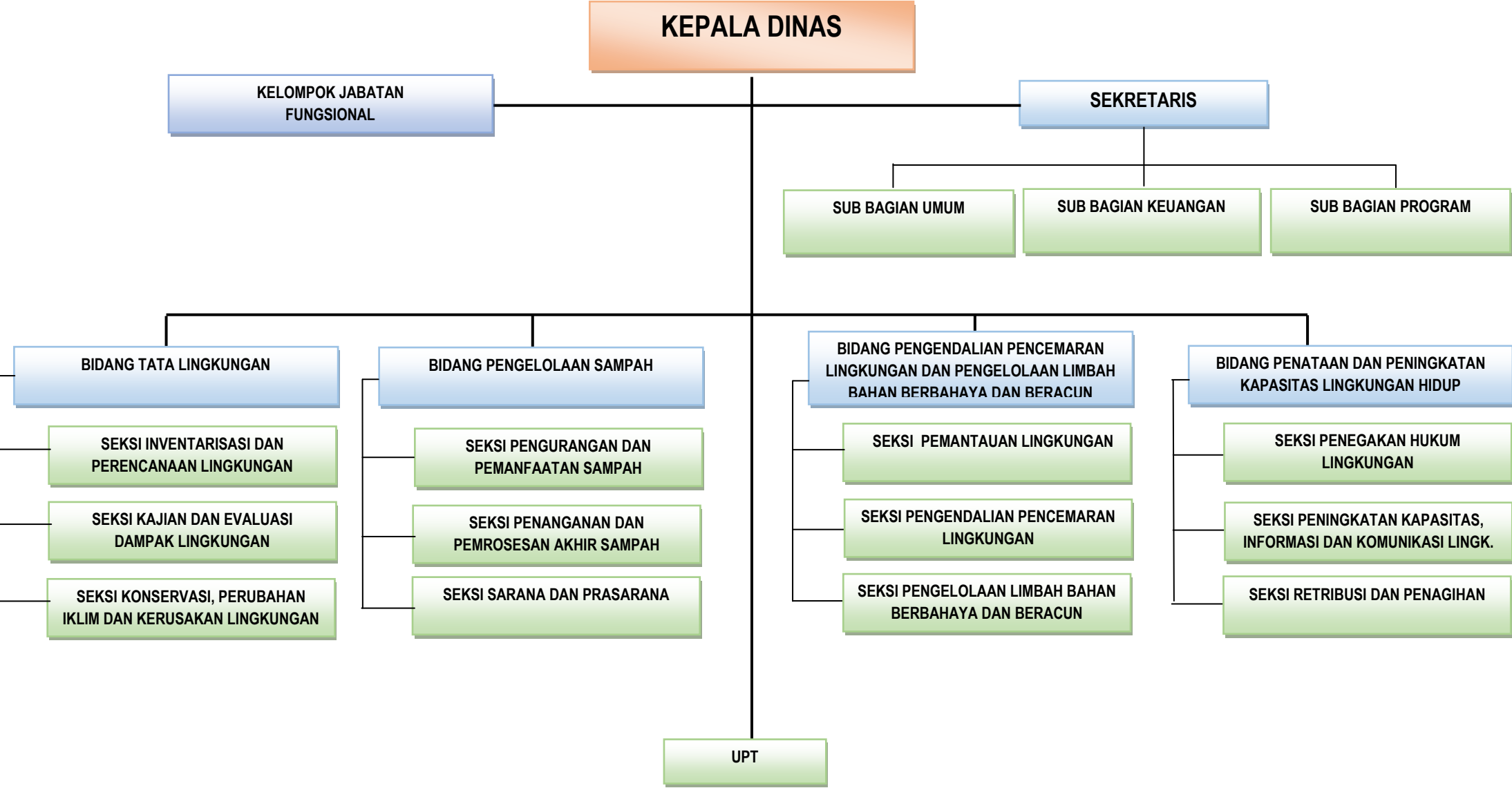
- 1) Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas;
- 4) Pengelolaan ketatausahaan dinas;
- 5) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional;
- 6) Pengkoordinasian dan fasilitasi;
- 7) Pembagian tugas dan pemberian petunjuk;
- 8) Pemeriksaan pekerjaan;
- 9) Pengevaluasian tugas;
- 10) Pelaporan pelaksanaan tugas;
- 11) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Susunan Organisasi Dinas DLHK, terdiri dari:

1. Kepala Dinas DLHK
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program.
3. Bidang Tata Lingkungan terdiri dari :
 - a. Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan;
 - b. Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan;
 - c. Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan
4. Bidang Pengelolaan Sampah terdiri dari :
 - a. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah;
 - b. Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
5. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri dari :
 - a. Seksi Pemantauan Lingkungan;
 - b. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - c. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

6. Bidang Penuatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
 - b. Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan;
 - c. Seksi Retribusi dan Penagihan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan 1 : Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru



2. Sumber Daya SKPD

a. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru didukung oleh pegawai/staf dari berbagai tingkat pendidikan, golongan dan jabatan serta pelatihan lingkungan hidup yang pernah diikuti.

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
		PNS
1	Strata 2 (S2) a. Ilmu Lingkungan b. Teknik Lingkungan c. Managemen d. Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air	10
2	Strata 1 (S1) a. Hukum b. Teknik c. Sosial Politik d. Ekonomi e. Komunikasi Islam f. Kesehatan Masyarakat g. Komputer h. Kehutanan i. Pertanian j. Biologi k. Kimia	5 7 5 6 1 1 2 1 1 1 1
3	D3	1
4	SLTA	15
	TOTAL	60

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2017

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	IV	10
2	III	37
3	II	13
	TOTAL	60

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Tahun 2017

No	Eselon	Jumlah (orang)
1	II	1
2	III	5
3	IV	15
	TOTAL	21

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai PNS Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	26
2	Wanita	34
	TOTAL	60

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan,
Pangkat dan Golongan Tahun 2017

JUMLAH PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN									JUMLAH PEGA WAI	JUMLAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN															
SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	60	GOL. I				GOL. II				GOL. III				GOL. IV			
										a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
1	1	12	-	-	2	32	12	-		-	-	-	-	1	5	4	3	7	7	11	12	5	4	1	-

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas/Jabatan Tahun 2017

NO	URAIAN TUGAS/ JABATAN	PEGAWAI NEGERI SIPI (ESELON/ORANG)					O & P	TENAGA HARIAN LEPAS (ORANG)					TOTAL	KETE RANGAN
		II	III	IV	STAF	JML		CS	ADM	Satpam	Sopir	JML		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13	
1	KEPALA DINAS	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
2	SEKRETARIAT	-	1	3	7	11	-	11	-	31	2	44	55	7 org. ke OPD Baru
3	BIDANG TATA LINGKUNGAN	-	1	3	7	11	-	-	-	-	-	-	11	
4	BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH	-	1	3	12	16	1217	-	-	-	-	1217	1233	11 org. ke OPD Baru
5	BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3	-	1	3	6	10	-	-	7	-	-	7	17	4 org. ke OPD Baru
6	BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	-	1	3	7	11	-	-	14	-	-	14	25	
TOTAL		1	5	15	39	60	1217	11	21	31	2	1282	1342	

Tabel 2.7. Pelatihan Lingkungan Hidup yang Diikuti Pegawai DLHK
Kota Pekanbaru

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Pegawai (orang)
1	DASAR- DASAR AMDAL	4
2	PENILAI AMDAL	3
3	AMDAL C	2
4	INVENTARISASI GRK & MRV	2
5	PROPER	5
6	AUDITOR LINGKUNGAN	1
7	PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3	3
8	PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR	3
9	PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA	4

2.2.1. Sarana dan Prasarana

Di samping sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang menjadi asset/modal Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disajikan pada Tabel 2.8

Tabel 2.8. Aset/Modal BLH Kota Pekanbaru

No	Aset/Modal	Keterangan
1	Gedung Kantor	1 unit
2	Gedung Laboratorium Udara (AQMS)	1 unit
3	Mobil Dinas	5 unit
4	Mobil laboratorium air	1 unit
5	Mobil operasional laboratorium udara	1 unit
6	Meja kerja	32 unit
7	Filling cabinet	32 unit
8	Lemari buku	6 unit
9	Komputer	12 unit
10	Laptop	6 unit
11	Mesin faximile	2 unit
12	Telepon	8 unit
13	Televisi	3 unit
14	Peralatan laboratorium kimia air (insitu)	1 paket
15	GPS	2 unit
16	Kamera	5 unit
17	Handycam	2 unit

Tabel 2.9
Daftar Inventaris/Aset Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kota Pekanbaru Tahun 2017

NO	JENIS INVENTARIS/ASET	JUMLAH
1	2	3
I	TANAH	
A	TANAH	Luas (M2)
	1. Tanah untuk bangunan Gedung jl. Raya Muara Pajar.	70000 m2
	2. Tanah untuk bangunan Tempat Pembuatan Kompos jl. Umban sari Kec. umban sari	1000 m2
	3. Tanah untuk bangunan gedung kantor pool dinas kebersihan jl rawa mangun kec. Bukit raya	5112 m2
	4. Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	25,00
	5. Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	288,00
	6. Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	24,00
	7. Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	24,00
	8. Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	24,00
	9. Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	10,00
	10. Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	5,00
	11. Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	10,00
	12. Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	24,00
	13. Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	20,00
	14. Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	2,00
	15. Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	121.000,00
	16. Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	5.000,00
	17. Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	70.000,00
	18. Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1.000,00

NO	JENIS INVENTARIS/ASET	JUMLAH
II	PERALATAN DAN MESIN	
	ALAT-ALAT BERAT	
	1. buldozer Caterpillar	2 unit
	2. Hidroulic Escavator	2 unit
	3. Sweeper Truck	1 unit
	ALAT-ALAT ANGKUTAN	
	1. Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	2 unit
	2. Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	1 unit
	3. Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1 unit
	4. Truck + Attachhment	36 unit
	5. Pick Up	8 unit
	6. Kendaraan Bermotor Angkutan Brg Lain-lain	8 unit
	7. Mobil Unit Perpustakaan Keliling	1 unit
	8. Sepeda Motor	13 unit
	9. Scooter	2 unit
	10. Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lain-lain	3 unit
	11. Gerobak Tarik	3 unit
	12. Gerobak Dorong	13 Unit
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
	1. Mesin Bubut	1 Unit
	2.Mesin Press	5 Unit
	4.Mesin Kompresor	2 Unit
	5.Mesin Las Listrik	1 Unit
	6.Perkakas Bengkel Lain-lain	1 Unit
	7.Perkakas Bengkel Service Lain-lain	4 paket
	8.Dongkrak Mekanik	1 Unit
	9.Tool Kit Set	9 Unit
	10.Engine Stand	1 Unit
	11.Global Positioning System (GPS)	2 Unit
	12.ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	6 Unit
	13. Alat Timbangan Biasa Lain-lain	1 Unit
	14 Alat Pertanian	1 paket
	15. Alat Pencacah Hijauan	1 Unit
	ALAT- ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
	1. Mesin Penghitung Uang	1 Unit
	2. Mesin Foto Copy dengan kertas biasa folio	1 Unit
	3. Rak Besi/Metal	3 Unit
	4. Filling Besi/Metal	3 Unit
	5. Perkakas Kantor	1 Unit
	6. Papan Nama Instansi	1 Unit
	7. Papan Pengumuman	1 Unit
	8. White Board	1 Unit
	9. Mesin Absensi	3 Unit
	10. Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	4 Unit
	11. Genset	2 Unit
	12. Mesin Pompa Air	6 Unit
	13. Meja Rapat	1 Paket
	14. Meja Reseption	1 Paket
	15. Kursi Rapat	1 Paket

NO	JENIS INVENTARIS/ASET	JUMLAH
	16. Kursi Tamu	2 Set
	17. Meja Komputer	10 unit
	18. Meja Biro	10 Unit
	19. Sofa	4 set
	20. Jam Elektronik	2 unit
	21. Lemari Es	1 set
	22. AC Unit	10 Unit
	23. AC Split	22 Unit
	24. Kipas Angin	1 Unit
	25. Televisi	3 Unit
	26. Sound System	1 Unit
	27. Camera Video	1 paket
	28. Camera Film	6 lokasi
	29. Tustel	2 Unit
	30. Alat Hiasan	2 unit
	31. Lambang Garuda Pancasila	1 paket
	32. Gambar Presiden/Wakil Presiden	1 paket
	33. Dispenser	8 unit
	34. Handy Cam	1 unit
	35. Alat Rumah Tangga Lain-lain	15 paket
	36. Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	1 set
	37. Mainframe	1 set
	38. Personal Komputer Lain-lain	8 unit
	39. P.C Unit/ Komputer PC	14 unit
	40. Scanner	1unit
	41. Printer	2 unit
	42. Lap Top	6 unit
	43. Note Book	20 unit
	44. Personal Komputer Lain-lain	3 & 15 unit
	45. Printer	25 unit
	46. Monitor	1 unit
	47. Peralatan Personal Komputer Lain-lain	21 unit
	48. Server	2 Paket
	49. Modem	1 paket
	50. Meja Kerja Pejabat Eselon II	5 paket
	51. Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 paket
	52. Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1 paket
	53. Peralatan Jaringan Lain-lain	1 paket

NO	JENIS INVENTARIS/ASET	JUMLAH
	54. Meja Kerja Pejabat Lain-lain	set
	55. Meja Operator	1 set
	56. Meja Rapat Pejabat Lain-lain	2 set
	57. Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 set
	58. Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1set
	59. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2 paket
	60. Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	5 paket
	61. Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 paket
	62. Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	2 set
	63. Lemari Buku untuk Perpustakaan	1 paket
	64. Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	2paket
	ALAT-ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	1 paket
	1. Camera + Attachment	3set
	2. Proyektor + Attachment	3 unit
	3. Unintemuptible Power Supply (UPS)	8 unit
	4. Camera Electronic	1 paket
	5. Alat Penyimpan Data	1 paket
	6. Megaphone	1 set
	7. Pesawat Telephone	1 set
	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	
	1. CCTV	1 set
	2. Lampu Sirine Tunggal	1 set
	GEDUNG DAN BANGUNAN	
	Bangunan Gedung	
	1. Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 unit
	2. Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 unit
	3. Bangunan Gedung Kantor Permanen	406 M2
	4. Bangunan Gedung Kantor Permanen	240 M2
	5. Bangunan Gedung Kantor Permanen	5 paket
	6. Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	23 Paket
	7. Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	23 Paket
	8. Bangunan Oceanarium Lain-lain	1 unit
	9. Bangunan Kamar Mandi	3unit
	10. Gedung Pos Jaga Permanen	1 paket
	11. Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain	2 paket
	12. Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain	1000 M2
	13. Gedung Garasi/Pool Permanen	1 paket

NO	JENIS INVENTARIS/ASET	JUMLAH
	14. Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain	1 paket
	15. Bangunan Gedung Pabrik Lain-lain	1 paket
	16. Bangunan Gedung Tempat Kerja lainnya	2 paket
	17. Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	7 paket
	18. Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	484 M2
	19. Konstruksi Pagar	2 paket
	20. Konstruksi Pagar	100 M2

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang sebelumnya adalah gabungan antara dua Perangkat Daerah yaitu Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

2.3.1. Layanan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (AMDAL/ UKL-UPL)

Pelayanan ini dilaksanakan oleh seksi kajian dan evaluasi dampak lingkungan pada bidang Tata Lingkungan yang bertanggung jawab dalam menilai dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) dan memeriksa dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).

Penilaian dokumen AMDAL dilakukan oleh Tim Teknis Penilai AMDAL dan Komisi Penilai AMDAL. Hasil akhir penilaian AMDAL berupa Surat Kelayakan Lingkungan Hidup yang ditandatangani oleh Walikota Pekanbaru dan pemeriksaan UKL-UPL berupa surat rekomendasi UKL-UPL yang ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Dalam rentang waktu 2013-2016, BLH Kota Pekanbaru telah melakukan penilaian Dokumen AMDAL dan UKL-UPL sebanyak 284 dokumen, 17 Dokumen AMDAL, 227 Dokumen UKL-UPL, 34 dikumen DPLH, dan 6 dokumen DELH.

Tabel 2.10. Dokumen Lingkungan yang telah Dinilai oleh BLH Kota Pekanbaru Tahun 2013-2016

No.	Dokumen Lingkungan	2013	2014	2015	2016	Jumlah
1.	AMDAL	2	6	5	4	17
2.	UKL-UPL	47	60	59	61	227
3.	DPLH	-	7	27	-	34
4.	DELH	-	-	6	-	6
	Jumlah	49	73	97	65	284

Sumber : BLH Kota Pekanbaru

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengimplementasikan visi dan misi kota Pekanbaru menjadi Pekanbaru Smart City yang Madani, maka pelayanan izin lingkungan direncanakan menggunakan aplikasi berbasis one-line yang akan dimulai pada tahun 2018.

Aplikasi proses izin lingkungan berupa :

- Informasi tentang dasar hukum Izin lingkungan hidup
- Informasi tentang jenis dokumen lingkungan hidup
- Proses penapisan
- Proses pengurusan izin lingkungan untuk dokumen;
 - a. UKL-UPL
 - b. DPLH
- Proses pengurusan SPPL
- Lacak dokumen lingkungan yang telah diajukan.

2.3.2. Layanan Perizinan Air Tanah

Layanan ini dilaksanakan oleh Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan pada Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL. Namun pada Tahun 2017 ini layanan perizinan air tanah ini telah di pindahkan ke ESDM. Pada awalnya pengaturan pemanfaatan air tanah dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah. Pengaturan dilakukan dengan penerbitan retribusi Izin Pengeboran (IP) dan Izin Pemanfaatan air tanah (IPA) untuk kegiatan industri, perhotelan, rumah makan, rumah sakit dan kegiatan usaha yang bersifat komersil di Kota Pekanbaru.

Namun, pada tahun 2009 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana hanya ada Pajak Air Tanah, maka Perda tersebut telah direvisi dan diganti dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Perizinan Air Tanah di Kota Pekanbaru dimana istilah retribusi tersebut dihapuskan. Jumlah Izin Air Tanah yang telah diterbitkan BLH Kota Pekanbaru 2012-2016 disajikan pada Tabel 2.9

Tabel 2.11. Izin Air Tanah yang telah dikeluarkan 2012-2016

Tahun	Izin Pengeboran (IP)	Izin Pemanfaatan Air (IPA)
2012	20	29
2013	25	25
2014	-	-
2015	-	-
2016	-	-

Sumber : BLH Kota Pekanbaru

2.3.3. Layanan Pengendalian Pencemaran Air

Dalam rangka meminimalkan dampak dari aktivitas pembuangan air limbah ke lingkungan, Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair. Layanan perizinan ini dulunya dilaksanakan oleh Sub bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah, sekarang dilaksanakan seksi pengendalian Pencemaran pada bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah B3. Izin limbah cair yang sudah dikeluarkan sampai Tahun 2016 disajikan pada Tabel 2.10

Tabel 2.12. Izin Limbah Cair yang sudah dikeluarkan Tahun 2013 hingga Tahun 2016

No	Nama Kegiatan Perusahaan	Jumlah Kegiatan
1	Rumah Sakit & Puskesmas	14
2	Hotel	4
3	Rumah Makan/Catering	1
4	PT, Industri, BUMN	6
5	Bengkel/ Showroom	4
Jumlah		29

Sumber : BLH Kota Pekanbaru

Dalam rangka pengendalian pencemaran air sungai, DLHK Kota Pekanbaru melakukan pemantauan kualitas air sungai pada titik-titik pantau tertentu. Hasil pemantauan tersebut diinterpretasikan ke dalam kelas air sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian untuk menetapkan kelas air.

Tabel 2.13. Nilai Indeks Pencemaran (IP) dan Status Perairan Sungai Siak Ruas Pekanbaru Berdasarkan Hasil Pemantauan Tahun 2015

No	Lokasi	Nilai I P		Status Perairan	
		I	II	I	II
ST 1	Jembatan Siak II	4,02	3,78	Tercemar ringan	Tercemar ringan
ST 2	Jembatan Siak I	9,35	8,15	Tercemar sedang	Tercemar sedang
ST 3	Sekitar PT. Asia Forestama Raya (AFR)	9,18	8,07	Tercemar sedang	Tercemar sedang
ST 4	Pelita Pantai	8,72	8,54	Tercemar sedang	Tercemar sedang
ST 5	Pelindo	8,53	8,12	Tercemar sedang	Tercemar sedang

Sumber : BLH Kota Pekanbaru
Ket : Pemantauan I Februari 2015
Pemantauan II November 2015

Tabel 2.14. Nilai Indeks Pencemaran dan Status Perairan Anak Sungai Siak Berdasarkan Hasil Pemantauan Tahun 2015

No	Lokasi	Nilai I P		Status Perairan	
		I	II	I	II
ST 1	Sungai Sail I	13,25	11,79	Tercemar berat	Tercemar berat
ST 2	Sungai Sail II	15,83	14,19	Tercemar berat	Tercemar berat
ST 3	Sungai Sail III	9,41	8,78	Tercemar sedang	Tercemar sedang
ST 4	Sungai Limau	18,82	17,64	Tercemar berat	Tercemar berat
ST 5	Sungai Sago	31,56	29,43	Tercemar berat	Tercemar berat
ST 6	Sungai Umban	4,62	3,37	Tercemar ringan	Tercemar ringan
ST 7	Sungai Air Hitam	8,13	7,05	Tercemar sedang	Tercemar sedang
ST 8	Sungai Tenayan	6,45	5,94	Tercemar sedang	Tercemar sedang
ST 9	Sungai Senapelan	29,41	27,62	Tercemar berat	Tercemar berat
ST 10	Sungai Pengambang	3,65	3,19	Tercemar ringan	Tercemar ringan
ST 11	Sungai Sibam	8,14	7,31	Tercemar sedang	Tercemar sedang

Sumber : BLH Kota Pekanbaru
Keterangan I = Pemantauan Februari 2015
II = Pemantauan November 2015

Berdasarkan data Tabel 2.11 dan 2.12 dapat disimpulkan bahwa :

1. Kualitas air Sungai Siak dan anak Sungai Siak tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan dalam PP No.82 Tahun 2001 untuk Air Kelas II. Kualitas air tersebut dipengaruhi oleh limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan domestik perkotaan dan juga disebabkan proses alamiah perairan.
2. Ditinjau dari segi kualitas air, maka beberapa perairan anak sungai berada dalam kondisi yang memperhatikan seperti Sungai Limau, Sungai Sago dan Sungai Senapelan.
3. Indeks Pencemaran Perairan Sungai Siak dikategorikan tercemar ringan sampai tercemar sedang, sedangkan Indeks Pencemaran anak-anak Sungai Siak di Kota Pekanbaru dikategorikan tercemar ringan sampai tercemar berat.



Gambar 2.1 Pengambilan sampel dan uji insitu sampel air sungai

2.3.4. Layanan Pengendalian Pencemaran Udara

Layanan pengendalian pencemaran udara ini berupa pemantauan rutin terhadap kualitas udara ambien kota Pekanbaru dilakukan melalui *Regional Air Quality Monitoring System (RAQMS)* / Laboratorium Udara yang merupakan satu di antara 8 *regional center* yang ada di Indonesia (Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar dan Palangkaraya).



Gambar 2.2 Data Display Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara

Pengukuran kualitas udara ambien tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) *fixed station* yang berlokasi di :

1. Jl. Pendidikan – Kulim (depan Workshop Dinas PU),
2. Jl. Ahmad Yani – Sukajadi (samping Kantor Camat Sukajadi),
3. Jl. HR. Subrantas (samping Kantor Camat Tampan).

Data yang diperoleh diolah dan divalidasi berdasarkan SNI 19-17025:2000 serta ditampilkan ke publik melalui display yang dapat dilihat di depan Kantor Walikota Pekanbaru dan di Jalan Tuanku Tambusai Simpang Jl. Soekarno-Hatta.

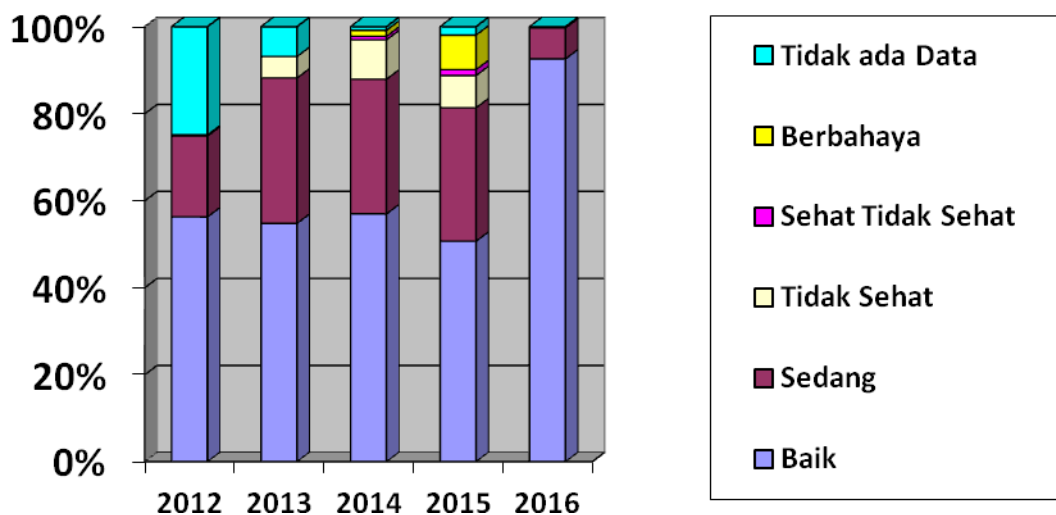
Kualitas udara ambien Kota Pekanbaru pada umumnya dipengaruhi oleh *particulate matter* (PM₁₀), yaitu polutan khas berupa debu, asap dan partikel lainnya yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan serta asap yang keluar dari kendaraan diesel (berbahan bakar solar).

Kualitas udara ambien Kota Pekanbaru cenderung mengandung konsentrasi PM₁₀ yang lebih tinggi yang disebabkan oleh asap kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi. Namun pada kondisi normal konsentrasi gas yang meningkat disebabkan oleh gas buang kendaraan bermotor/transportasi.

Tabel 2.15. Kualitas Udara Ambien Kota Pekanbaru Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Hari						Total
	Baik	Sedang	Tidak Sehat	Sangat Tidak Sehat	Berbahaya	Tidak Ada Data	
2012	206	68	1	0	0	91	366
2013	200	122	18	0	0	25	365
2014	208	113	33	3	5	3	365
2015	185	112	27	5	29	7	365
2016	339	26	0	0	0	1	366

Sumber : BLH Kota Pekanbaru



Gambar 2.3. Grafik Perbandingan Kualitas Udara Ambien Kota Pekanbaru Tahun 2012-2016

Berdasarkan Gambar 2.3 dapat dilihat bahwa kualitas udara ambien di Kota Pekanbaru dominan berada pada kondisi *Baik* diikuti dengan *Sedang*. Pada tahun 2012, kualitas udara *Tidak Terdata* tampak mencolok akibat tidak berfungsinya alat karena rusak sehingga tidak dapat mengukur kualitas udara ambien. Namun demikian di akhir tahun 2012 ini peralatan AQMS telah diperbaiki dan berfungsi kembali sebagaimana mestinya. Untuk tahun 2015 dapat kita lihat terdapat kualitas udara berbahaya di wilayah Kota Pekanbaru.

Pada pertengahan bulan September 2015 provinsi Riau ditetapkan sebagai Darurat Asap, sebagian besar udara berbahaya mengepung wilayah di Provinsi Riau termasuk Kota Pekanbaru. Untuk tahun 2016 kualitas udara wilayah Kota Pekanbaru dominan baik. Selain melakukan pemantauan terhadap kualitas udara ambien, DLHK Kota Pekanbaru juga melakukan uji emisi gas buang kendaraan bermotor.

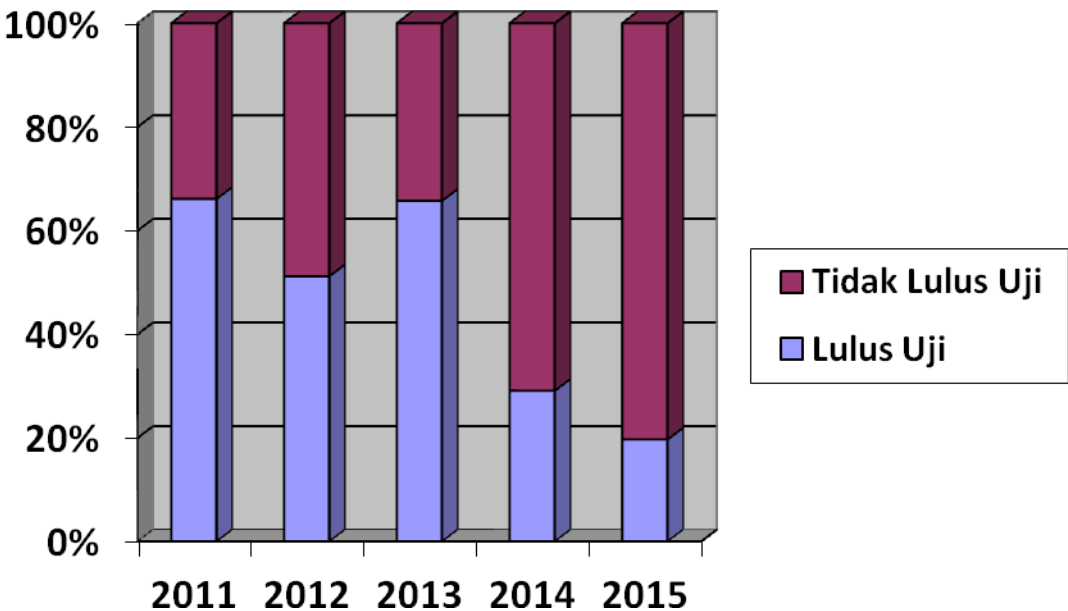


2.4 Gambar Uji Emisi Kendaraan Bermotor (Sumber Bergerak)

Tabel 2.16. Hasil Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru 2012 – 2015

Pelaksanaan Uji Emisi	Jumlah Kendaraan yang Diuji			Lulus Uji			Tidak Lulus Uji		
	Bensin	Solar	Total	Bensin	Solar	Total	Bensin	Solar	Total
Juni 2011	253	63	316	227	41	268	26	21	47
Juni 2012	202	170	372	177	87	264	25	83	108
Juli 2013	317	156	473	286	96	382	31	50	81
Juni 2014	414	299	713	374	87	461	40	212	252
Mei 2015	332	127	459	313	25	338	19	102	121

Gambar 2.5. Grafik Hasil Uji Emisi Kendaraan Berbahan Bakar Bensin



Gambar 2.6. Grafik Hasil Uji Emisi Kendaraan Berbahan Bakar Solar

Berdasarkan Gambar 2.5 dan 2.6, dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru, baik kendaraan berbahan bakar bensin maupun solar cenderung memenuhi baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor dimana jumlah yang lulus uji lebih dari 50 % dibandingkan yang tidak lulus uji, kecuali pada kendaraan berbahan bakar solar pada uji emisi tahun 2012 , 2014, dan 2015.

2.3.5. Layanan Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sebagai tindak lanjut melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menerbitkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Layanan perizinan ini dilaksanakan oleh Sub bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3 pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah. Sampai dengan akhir tahun 2017, BLH Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 kepada 37 usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang ada di Kota Pekanbaru ntuk izin pengumpulan limbah B3.

Tabel 2.17. Izin TPS Limbah B3 yang telah Dikeluarkan BLH Kota Pekanbaru Tahun 2013 sampai Tahun 2017

No	Nama Kegiatan	Jumlah Kegiatan
1	Layanan Kesehatan	15
2	Pusat Perbelanjaan/Mall	1
3	Hotel	7
4	Perusahaan	14

Sumber: BLH Kota Pekanbaru



Gambar 2.7 Verifikasi TPS Limbah B3 dan TPS Limbah B3

2.3.6. Layanan Pembinaan Sekolah ADIWIYATA

Layanan ini dilaksanakan oleh Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Program ADIWIYATA merupakan pendidikan lingkungan hidup atau penyadaran lingkungan ke sekolah-sekolah dengan tujuan mendorong dan membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang.

Tabel 2.18 Penghargaan Sekolah ADIWIYATA

Tingkat Sekolah	Jumlah Sekolah			
	2013	2014	2015	2016
SD	5	3	47	66
SMP	1	2	21	16
SMA/MTS/SMK	2	4	17	15
Total	8	9	85	97

Sumber: BLH Kota Pekanbaru

Tabel 2.19 Data Tingkat Anugrah Adiwiyata

Jenis Penghargaan	SD/MA	SMP	SMA/MAN	Total
Mandiri	6	1	2	8
Nasional	16	6	11	33
Propinsi	28	12	12	52
Kota	74	22	12	108

Sumber: BLH Kota Pekanbaru

2.3.7. Layanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup

Sesuai dengan PermenLH Nomor 19 Tahun 2008, tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan termasuk standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh BLH Kota Pekanbaru. Melalui anggaran tahun 2012, BLH Kota Pekanbaru membuat Pos Pengaduan Lingkungan agar masyarakat berperan aktif dalam mengawasi lingkungan.

Masalah lingkungan yang sering dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, yaitu :

1. Pencemaran air sungai oleh kegiatan industri, hotel dan rumah sakit.
2. Pencemaran air sumur oleh minyak/oli.
3. Pencemaran udara akibat asap genset, insinerator dan cerobong asap pabrik.
4. Pencemaran udara akibat bau yang menyengat.
5. Kebisingan akibat usaha/kegiatan industri, burung walet dan genset.
6. Perubahan bentang alam akibat pengerukan tanah timbun.
7. Banjir akibat penutupan parit/anak sungai.

Dalam rentang 2012 – 2015, setiap pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/perusakan lingkungan hidup selalu ditindaklanjuti dan dapat terselesaikan dengan baik (100 %). Pada tahun 2012 terdapat 10 pengaduan, tahun 2013 terdapat 9 pengaduan, tahun 2014 terdapat 5 pengaduan dan 2015 terdapat 10.

Di samping pelayanan di atas, kinerja pelayanan bidang lingkungan hidup juga harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008. Adapun Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan adalah :

1. Pelayanan pencegahan pencemaran air.
2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara sumber tidak bergerak
3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

2.3.8. Layanan Pengelolaan Persampahan

1. Sistem pengelolaan sampah

Sistem pengelolaan sampah yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru dibedakan menurut sumber sampah sebagai berikut :

- a. Sampah yang bersumber dari lingkungan pemukiman.
Pengelolaan sampah lingkungan pemukiman dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan dengan Pungutan Retribusi Kebersihan kepada Masyarakat atas jasa pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dan yang membuang langsung di TPA.
- b. Sampah yang bersumber dari lingkungan pasar.
Untuk pengelolaan sampah yang bersumber dari lingkungan pasar saat ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan Pungutan Retribusi Kebersihan kepada Masyarakat atas jasa pelayanan pengangkutan sampah lingkungan pasar dari TPS ke TPA dan yang membuang langsung di TPA.
- c. Sampah yang bersumber dari lingkungan terminal dan pelabuhan.
Untuk Pengelolaan sampah yang bersumber dari lingkungan terminal dan pelabuhan ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan Pungutan Retribusi Kebersihan kepada Masyarakat atas jasa pelayanan pengangkutan sampah lingkungan Terminal dan Pelabuhan dari TPS ke TPA dan yang membuang langsung di TPA.
- d. Sampah yang bersumber dari Jalan-Jalan Protokol.
Penanganan Sampah disepanjang jalan protokol khususnya penyapuan dan pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Pada Tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memiliki tanggung jawab sebanyak 94 (dua puluh empat) ruas jalan protokol.

Pada tanggal 16 November 2015 dilakukan kerjasama pengangkutan sampah dengan pihak mitra. Namun karna terdapat permasalahan dilakukan pemutusan kontrak pada bulan juni 2016. Pada saat sekarang semua pengangkutan sampah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru.

Kondisi Pelayanan kebersihan sampai saat ini masih belum menjangkau seluruh wilayah Kota Pekanbaru sehingga permasalahan penanganan sampah masih kerap terjadi seperti masih tercecer atau tidak terangkutnya sejumlah sampah di berbagai wilayah dikarenakan beberapa hal seperti keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah serta koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait. Selain itu kurangnya ketersediaan TPS sehingga tidak dapat menampung jumlah sampah rumah tangga dari masyarakat. Untuk TPS-3R terdapat 6 unit yang ada di Kota Pekanbaru yang dibangun oleh Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLPP) yang dihibah untuk digunakan ke masyarakat.

2. Timbulan Sampah.

Timbulan sampah merupakan volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sampah di wilayah tertentu, timbulan sampah di Kota Pekanbaru setiap tahunnya selalu meningkat ini dikarenakan jumlah penduduk yang selalu bertambah setiap tahunnya.

Pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2016 yaitu 2,53 % pertahun. Menurut sensus BPS Kota Pekanbaru jumlah penduduk Kota Pekanbaru tahun 2016 berjumlah 1.064.566 jiwa.

Tabel 2.20
Kondisi Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru Tahun 2016

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Produksi Sampah	Jumlah Sampah Terangkut (Kg/Hari)	Selisih (Produksi Sampah - Jumlah Sampah Terangkut)
			Kg/ Hari		
1.	Tampan	269.062	188.343,4	97.909	90.434
2.	Payung Sekaki	90.665	63.465,5	30.572	32.894
3.	Bukit Raya	103.144	72.200,8	29.022	43.179
4.	Marpoyan Damai	131.245	91.871,5	26.140	65.732
5.	Tenayan Raya	158.519	110.963,3	3.690	107.273
6.	Lima Puluh	41.437	29.005,9	25.259	3.747
7.	Sail	21.479	15.035,3	8.080	6.955
8.	Pekanbaru Kota	25.094	17.565,8	21.983	-4.417
9.	Sukajadi	47.364	33.154,8	37.774	-4.619
10.	Senapelan	36.548	25.583,6	20.526	5.058
11.	Rumbai	67.523	47.266,1	13.656	33.610
12.	Rumbai Pesisir	72.516	50.761,2	15.898	34.863
	Total	1.064.566	745.196,2	331.510	413.686

Sumber : DKP Kota Pekanbaru

Dari Tabel diatas dapat di lihat bahwa total jumlah timbulan sampah rata- rata yang terangkut ke tempat pembuangan akhir adalah sebesar 331.510 kg/hari. Total selisih produksi sampah dengan jumlah sampah yang terangkut adalah sebesar 413.686 kg/hari.

Selain dengan metode pengangkutan, upaya pelayanan pengelolaan persampahan dilaksanakan dengan penanganan sampah skala lingkungan melalui pola 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) atau mengurangi, memanfaatkan kembali dan mendaur ulang sampah.

Kegiatan diawali dengan memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah dan masyarakat serta mengadakan bimbingan teknis dan pemahaman konsep 3R kepada aparat kelurahan dan perwakilan dari masyarakat/LPM yang bertujuan sebagai sarana pembelajaran untuk diaplikasikan di lingkungan pemukiman.

Sampai dengan Tahun 2017 mayoritas kecamatan yang menerapkan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) 3%-5% merupakan inisiatif warga dengan pengolahan mandiri, antara Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Marpoyan Damai.

Selain itu, DLHK Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah memiliki Seksi Pengurangan dan pemanfaatan sampah membawahi pengelolaan sampah skala kota, yaitu berupa:

- a. Rumah Kompos
- Rumah kompos merupakan tempat pengelolaan sampah organik menjadi pupuk organik (kompos). Berikut Rumah kompos yang ada di bawah pengawasan DLHK Kota Pekanbaru pada tabel 2.21

Tabel 2.21 Rumah Kompos dibawah pengawasan DLHK Kota Pekanbaru

NO	Nama Rumah Kompos	Lokasi
1	Komposting Umban Sari	Jl. Geso Umban Sari Kec. Rumbai
2	Komposting TPA Muara Fajar	Jl. Ikan raya muara fajar
3	Komposting Cempaka	Jl. Cempaka Kec. Sukajadi
4	Komposting Hutan Kota	Jl. Ronggowarsito Kec. Sail
5	Komposting Garuda Sakti	Jl. Garuda Sakti Tampan

Sumber: DLHK Kota Pekanbaru

- b. Bank Sampah
- Bank sampah merupakan tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang dan/ digunakan ulang sehingga memiliki nilai ekonomis. Kota Pekanbaru memiliki 5 Bank Sampah yang merupakan binaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Berikut Bank Sampah yang ada di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel 2.22

Tabel 2.22 Bank Sampah yang di Kota Pekanbaru

No	Nama	Alamat	Jumlah sampah yang dikelola
1	Bank Sampah Dallang Collection	Jl. Gajah Mada No. 33	30
2	Bank Sampah Berlian Labuay	Jl. Embun pagi Kel.Tangkerang Labuay	0.14
3	Bank Sampah Bukit Hijau Berlian	Jl. H.R Soebrantas No. 52 Kec. Tampan	0.07
4	Bank Sampah Mitra Karya	JL. Pemuda Kec. Tampan	0.52
5	Bank Sampah Berlian (DLHK)	Jl. Datuk Setia Maharaja Kec. Bukit Raya	0.18

Sumber: DLHK Kota Pekanbaru

2.3.9. Layanan Retribusi dan Penagihan

Jumlah penduduk kota Pekanbaru yang terus bertambah menimbulkan bertambahnya jumlah sampah dan permasalahan sampah yang semakin kompleks dan perlu dikelola secara profesional berdasarkan UU RI Nomor 08 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2000 tanggal 31 Oktober 2000 tentang Retribusi Kebersihan. Penekanan UU RI Nomor 08 Tahun 2008 dan Perda Nomor 04 Tahun 2000, diamanatkan bahwa pengelolaan kebersihan merupakan tanggungjawab pemerintah Daerah, dalam Hal ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Berikutnya Pelayanan Retribusi persampahan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2012 tentang Retribusi pelayanan persampahan/ Kebersihan Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tatakelola Retribusi Persampahan/ Kebersihan Kota Pekanbaru. Pelaksanaan dan tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.

Dalam proses penarikan dan penagihan Retribusi sampah masih perlu adanya peningkatan dalam memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Perolehan realisasi retribusi pada Tahun 2016 diperoleh sebesar Rp.1.891.771.000-, sedangkan pada tahun 2017 perolehan realisasi retribusi hingga 18 Desember yaitu sebesar Rp.3.143.114.000-,. Berikut data realisasi pelayanan retribusi kebersihan Kota Pekanbaru.

Tabel 2.23 Target dan Realisasi Retribusi dan Penagihan
Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017

Tahun	Retribusi dan Penagihan	
	Target	Realisasi
2016	34.474.624.500	1.891.771.000
2017*	48.583.682.256	3.143.114.000

Sumber : DLHK
Ket : * Data Tahun 2017 realisasi hingga 18 Desember 2017

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah karena termasuk dalam lingkup non pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. DLHK Kota Pekanbaru yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan wajib tersebut dituntut supaya dapat melaksanakannya dengan sebaik baiknya.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru merupakan gabungan 2 OPD. Hal ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri sebagai OPD baru dalam menyelesaikan tugasnya tersebut, yang pastinya memiliki tugas yang lebih kompleks dari tupoksi sebelumnya.

Untuk maksud tersebut, DLHK Kota Pekanbaru telah melakukan identifikasi beberapa tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Tahun 2017 - 2022 antara lain :

2.4.1. Kualitas lingkungan hidup (udara, air dan tanah) cenderung mengalami penurunan

Kondisi ini merupakan tantangan yang berat dalam rangka pengembangan pelayanan. Kecenderungan kualitas lingkungan hidup menurun dapat terus terjadi apabila tidak segera ditangani dengan cara-cara yang tepat dan bijak. Penurunan kualitas lingkungan ini terjadi akibat peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus beresiko terhadap kelangsungan sumberdaya alam. Perubahan kualitas lingkungan juga dipengaruhi oleh fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah pengembangan pelayanan yang tepat dan konsisten sehingga diharapkan di masa mendatang kecenderungan tersebut tidak terjadi.

2.4.2. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran sebagian masyarakat dan pelaku usaha sumber pencemar terhadap pengelolaan lingkungan

Kondisi ini juga menjadi tantangan yang berat dalam rangka pengembangan pelayanan. Kurangnya kepedulian terhadap lingkungannya tersebut telah berlangsung lama dan masih terjadi sehingga perlu segera dilakukan upaya-upaya pelayanan yang tepat sasaran sehingga diharapkan dimasa mendatang timbul kepedulian dan komitmen yang kuat terhadap pengelolaan lingkungannya.

2.4.3. Lemahnya sanksi penegakkan hukum bidang lingkungan, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundangan pengelolaan lingkungan baik di tingkat pusat dan daerah serta kurangnya koordinasi antar sektor.

Kondisi tersebut merupakan tantangan lainnya dalam pengembangan pelayanan lingkup lingkungan hidup. Kencenderungan lemahnya koordinasi dan sinergitas antar instansi pemerintah ini sangat besar terjadi dan apabila tidak segera ditangani dengan baik sangat menghambat kinerja pelayanan. Di samping itu, kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektor menyebabkan perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial.

2.4.4. Kuatnya komitmen pimpinan terhadap permasalahan lingkungan hidup

Kondisi tersebut merupakan peluang besar bagi pengembangan pelayanan bidang lingkungan hidup. Dengan adanya komitmen pimpinan yang kuat, diharapkan dimasa mendatang beberapa jenis pelayanan yang membutuhkan sumber daya besar sebagai masukannya dapat dipenuhi sehingga cakupan pelayanan menjadi lebih baik.

2.4.5. Adanya dukungan dari organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan pusat-pusat studi yang bergerak di bidang lingkungan hidup

Kondisi ini merupakan peluang besar dalam rangka pengembangan pelayanan. Dengan adanya dukungan tersebut diharapkan dimasa mendatang beberapa jenis pelayanan dapat dilaksanakan dengan hasil-hasil yang lebih optimal.

2.4.6. Adanya instrumen untuk meningkatkan prestasi dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari berbagai stakeholder, seperti PROPER, ADIPURA, ADIWIYATA, PROKLIM dan sebagainya

Kondisi ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga pelayanan semakin berkembang dengan baik.

2.4.7. Pengelolaan Persampahan

Meningkatnya Jumlah penduduk dan pembangunan telah memberikan dampak negatif antara lain terjadinya peningkatan timbulan sampah yang jauh melebihi sarana prasarana pengelolaan dan kapasitas pelayanan, sehingga menyebabkan penumpukan sampah yang pada akhirnya sampah menjadi masalah yang serius yang menuntut penanganan secara cepat, tepat, dan profesional. Kenyataan yang mendasar dari permasalahan sampah perkotaan ini adalah Kondisi yang semakin kompleks dan dinamis, kompleks karena melibatkan banyak pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) seperti Pemerintah, masyarakat, industri, pedagang dan LSM, Dinamis karena produksi sampah akan berubah seiring dengan perubahan waktu. Kenyataan ini menyebabkan penanganan sampah tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan teknis (mulai dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan sampai pengolahan di TPA) tetapi harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan masyarakat sebagai sumber utama penghasil sampah. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengatasi masalah persampahan sangat menjadi beban dalam pengelolaan persampahan bagi pemerintah.

Dalam rentang 2012-2017 telah dilakukan beberapa langkah untuk meningkatkan pelayanan kebersihan, dengan target akhir RPJMD 74,8 % pengelolaan sampah Kota Pekanbaru terlayani, hal tersebut sangat relevan dengan volume sampah terangkut/terolah dibandingkan dengan timbulan sampah.

Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan tersebut akan dilakukan dengan melaksanakan pengembangan daerah pelayanan baru. Penetapan pengembangan daerah pelayanan pengelolaan persampahan akan dilakukan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut :

1. Daerah yang menjadi wajah kota.
2. Daerah komersil.

3. Daerah Permukiman dengan kepadatan >100 jiwa/ha
4. Daerah timbulan sampah besar.
5. Daerah Pemukiman dengan kepadatan >50 jiwa/ha.

Peningkatan pelayanan dapat dilakukan dengan pengembangan tersebut diatas dengan pengelolaan dengan cara antara lain :

1. Skala Rumah Tangga dengan menitikberatkan pengolahan sampah organik menjadi kompos, dengan beberapa opsi teknologi misalnya dengan gentong komposter, keranjang Takakura dan Biopori.
2. Skala Kawasan/Lingkungan, yaitu pengelolaan yang dilakukan untuk melayani suatu kelompok masyarakat yang terdiri atas sekurang-kurangnya 100 kepala keluarga, dengan opsi teknologi antara lain :
 - a. Pemilahan sampah di sumber.
 - b. Pemilahan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu

Selain itu permasalahan pewadahan sampah sebagai penampungan sampah sementara baik itu tong sampah maupun TPS masih belum memadai, penampungan sampah sementara disumbernya baik individual maupun komunal sering dilakukan dengan sistem tercampur artinya masih minim melakukan pemilahan terlebih dahulu, disamping itu fasilitas pewadahan sampah toyang masih terbatas dan penyebarannya belum merata atau menjangkau kualitas cakupan daerah pelayanan.

Sistem Pengumpulan sampah melalui proses pengangkutan sampah menuju transfer depo atau kontainer belum efektif dikarenakan masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kondisi saat ini jumlah TPS yang dimiliki hanya berjumlah sebanyak 17 TPS. Untuk Pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru dari TPS/Bak-Bak sampah menuju TPA masih belum maksimal, sampah tidak dapat terangkut seluruhnya ke TPA karena keterbatasan armada dan sumberdaya manusia.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sebanyak 2 unit, pertama TPA Muara Fajar I di Jl. Ikan Raya Kecamatan Rumbai seluas 8,6 Ha dan sebagian telah dijadikan sel sampah. TPA Muara Fajar I pengelolaannya menggunakan sistem *sanitary landfill* dengan metoda *area method*, sehingga dampak buangan sampah tidak mencemari lingkungan sekitar. Selanjutnya TPA Muara Fajar 2 berlokasi di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai dengan luas lahan 4.96 Ha. Identifikasi peluang dan Tantangan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

A. Peluang :

1. Adanya perubahan konsep atau paradigma baru pengelolaan sampah dengan konsep 3R.
2. Adanya mitra kerja di tingkat pusat maupun propinsi dan tingkat kab/kota dalam pengelolaan persampahan.
3. Adanya sarana dan fasilitas yang dimiliki untuk mendukung pelayanan Kebersihan.
4. Adanya dasar hukum dan kewenangan yang mengatur pengelolaan Kebersihan.
5. Pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengelolaan sampah.
6. Terlaksananya sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
7. Tingginya komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan Pekanbaru sebagai kota terbersih.
8. Adanya lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam rangka pengembangan teknologi dan sumberdaya lingkungan

B. Tantangan

1. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur dalam pengelolaan dan penanganan persampahan.
2. Terbatasnya cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan persampahan.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
4. Tingginya volume dan peningkatan timbulan sampah setiap tahunnya.

5. Masih lemahnya koordinasi antar OPD dan Instansi terkait pengelolaan dan penanganan sampah.
6. Terbatasnya lahan untuk lokasi TPS dan TPA.
7. Kurangnya kesadaran dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam pengelolaan dan penanganan sampah.

3. Tantangan dan Isu Utama (Strategic Issued) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

- Pencemaran Air
- Pencemaran Udara
- Pencemaran Tanah
- Peningkatan Timbunan Tanah
- Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Perubahan Iklim

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru selama tahun 2017. Capaian kinerja (*performance results*) 2017 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2017 adalah sebagai berikut ini :

- Bab I - **Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan struktur organisasi serta isu utama (strategic Issued) yang sedang dihadapi;
- Bab II - **Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja untuk tahun 2017.
- Bab III - **Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2017.
- Bab IV - **Penutup**, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tahun 2017 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

BAB - II PERENCANAAN KINERJA

A. UMUM

Dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang ada di Kota Pekanbaru, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) menyadari sepenuhnya akan peran di masa yang akan datang sebagai tumpuan dan harapan masyarakat kota untuk mengatasi masalah lingkungan dan kebersihan serta berbagai persoalan yang timbul akibat perubahan pola hidup masyarakat perkotaan. Masalah banjir yang masih menghantui kawasan perkotaan serta buruknya persoalan lingkungan seperti sampah dan kebersihan lingkungan merupakan tantangan kedepan yang harus diselesaikan secara bertahap.

Untuk menjalankan peran penting tersebut, DLHK Kota Pekanbaru mempunyai Visi ***“Terwujudnya Kota Pekanbaru Berwawasan Lingkungan yang Madani”***.

Visi tersebut merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Dalam rangka menjabarkan Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, sesuai dengan tugas dan fungsinya maka dirumuskan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia berbasis teknologi dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Mewujudkan perencanaan lingkungan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
3. Menciptakan lingkungan bersih bebas sampah berbasis teknologi ramah lingkungan.
4. Mengoptimalkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
5. Meningkatkan konservasi, mitigasi adaptasi perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati.
6. Melaksanakan pembinaan, peningkatan kapasitas masyarakat serta penegakan hukum dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru 2017-2022 ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan sampah perkotaan
2. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
3. Meningkatnya Upaya Perlindungan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

B. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Kebijakan merupakan elemen pertama dari strategi yang perlu ditetapkan sebagai dasar atau ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan. Kebijakan secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tahun 2017 adalah sebagai berikut

1. Penerapan regulasi dalam hal pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
2. Penerapan regulasi di bidang perlindungan dan konservasi sumberdaya alam;
3. Penyediaan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
4. Perluasan cakupan layanan pengangkutan sampah dan Satgas kebersihan di titik pembuangan sampah.

strategi yang akan ditempuh DLHK Kota Pekanbaru, yaitu :

1. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan;
2. Melaksanakan perlindungan dan konservasi sumber daya air, udara, hutan dan lahan;
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup kepada masyarakat;
4. Melaksanakan pemantauan terhadap pencemaran air, udara dan tanah serta tindak lanjut pengaduan masyarakat.

Selain kebijakan umum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru juga memiliki kebijakan operasional yang pelaksanaannya ditentukan berdasarkan skenario pembangunan yang dipilih dan dapat mengantisipasi berbagai isu dan lingkungan strategis yang berkembang. Berdasarkan tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi tersebut, serta dikaitkan dengan penganggaran, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menetapkan 10 (Sepuluh) program. Adapun program tersebut sebagai berikut:

1. **Program pelayanan administrasi perkantoran.** Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
 - 1) Penyediaan jasa surat menyurat
 - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - 5) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - 6) Penyediaan alat tulis kantor
 - 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 9) Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan
 - 10) Penyediaan makanan dan minuman.
 - 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2. **Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.** Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
 - 1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - 2) Pengadaan peralatan gedung kantor
 - 3) Pengadaan mebeleur
 - 4) Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
3. **Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur,** Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:
 - 1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
4. **Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.** Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
 - 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 2) Penyusunan laporan keuangan semesteran
 - 3) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5. **Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan,** Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
 - 1) Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
 - 2) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
 - 3) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
 - 4) Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
 - 5) Bimbingan teknis persampahan
 - 6) Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
 - 7) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
 - 8) Pengembangan dan Penataan Tempat Pembuangan Akhir Sampah
6. **Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup,** Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
 - 1) Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
 - 2) Pemantauan Kualitas Lingkungan
 - 3) Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
 - 4) Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
 - 5) Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
 - 6) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
7. **Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam,** Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
 - 1) Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
 - 2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

8. **Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup,** Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
 - 1) Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Hidup
 - 2) Pengembangan data dan informasi lingkungan
9. **Program Peningkatan Pengendalian Polusi,** Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
 - 1) Pengujian emisi kendaraan bermotor
 - 2) Pengujian kadar polusilimbah padat dan limbah cair
 - 3) Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
10. **Program Perencanaan Pembangunan Daerah,** Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
 - 1) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Penetapan Kinerja atau kini disebut dengan Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan organisasi yang lebih tinggi kepada pimpinan organisasi yang lebih rendah atau biasa disebut juga sebagai kontrak kinerja. Penetapan/Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mengacu pada Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pada tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru telah melaksanakan perjanjian kerja antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan Walikota Pekanbaru. Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2017

No	Program	Kegiatan		Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3		4	5	6	7
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya dan terlaksananya administrasi	Dokumen yang terkirim bermaterai	Materai 3000 (200 buah) Materai 6000 (2500 buah)	15.600.000
		2.	Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya komunikasi, air dan listrik	Komunikasi dan penerangan yang baik	12 bulan	427.920.000
		3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kendaraan Dinas/operasional baik dan dapat dipakai	Terlaksananya Kelancaran operasional kegiatan dinas	1 buah mobil sweeper Road, 18 unit Roda 4, 16 Unit Roda 2,	2.691.165.150
		4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kantor bersih nyaman dan indah	44 Orang THL, 23 unit alat Kebersihan	760.171.947
		5.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan peralatan kerja	Peralatan kerja dapat dipergunakan	114 unit	61.817.500
		6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kelancaran kerja	47 jenis	127.272.479
		7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan jasa percetakan dan foto copy	Dokumen dan surat dinas	31 jenis	453.403.455
		8.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya instalasi listrik dan penerangan kantor	Kelancaran kerja	16 jenis	6.312.240
		9.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan buku peraturan	Meningkatkan wawasan aparatur	84 eksemplar	11.760.000
		10.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai/ tamu	Meningkatkan motivasi pegawai	1 tahun	164.956.000
		11.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Tersedianya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Meningkatnya motivasi dan disiplin pegawai	50 orang	500.000.000

No	Program	Kegiatan		Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3		4	5	6	7
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor	Lancarnya tugas kedinasan	7 jenis	152.821.889
		13.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	Lancarnya tugas kedinasan	18 unit	74.378.175
		14.	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	Lancarnya tugas kedinasan	33 unit	71.924.300
		15.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Lancarnya tugas kedinasan	1 unit	110.000.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	PNS yang mengikuti Bimtek	Meningkatnya pemahaman PNS	20 orang	311.502.577
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17.	Penyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Sistem kinerja dan keuangan	Laporan kinerja dan keuangan	1 laporan	5.390.000
		18.	Penyusun laporan keuangan semeseteran	Sistem kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan keuangan	1 laporan	2.463.500
		19.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Sistem kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan keuangan	1 laporan	4.952.000

No 1	Program 2	Kegiatan 3		Sasaran Strategis 4	Indikator kinerja 5	Target 6	Anggaran (Rp) 7
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	20.	Penyusunan Kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Terlaksananya pengelolaan persampahan yang baik	Dokumen Rancangan Perda Retribusi Sampah	1 Dokumen	74.211.750
		21.	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Terlaksananya pengelolaan persampahan yang baik	Tersedia dan terpeliharanya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	19 jenis bahan pembersih, 9 unit bahan baku bangunan, 11 stel pakaian kerja lapangan	353.686.036
		22.	Peningkatan operasi dari pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terlaksananya pengelolaan persampahan yang baik	Terlaksananya operasional penyapuan dan pengangkutan sampah	1 kegiatan	35.410.998.400
		23.	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	Terlaksananya pengelolaan persampahan yang baik	Tersedianya sarana pengelolaan persampahan berupa unit komposting	1 set	959.530.300
		24.	Bimbingan Teknis persampahan	Terlaksananya pengelolaan persampahan yang baik	Terlaksananya bimbingan teknis untuk masyarakat	120 orang	183.283.500
		25.	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Terlaksananya pengelolaan persampahan yang baik	Terlaksananya sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah kepada masyarakat	500 orang	588.656.840
		26.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Terlaksananya pengelolaan persampahan yang baik	Terlaksananya perlombaan K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban) di tingkat Kelurahan se-Kota Pekanbaru serta terlaksananya kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional	1 kegiatan	439.160.050
		27.	Pengembangan dan penataan tempat pembuangan akhir sampah	Terlaksananya pengelolaan persampahan yang baik	Terlaksananya operasional pengelolaan TPA sampah	1 kegiatan	6.617.715.847
7	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	28.	Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	Terlaksananya pengendalian lingkungan perkotaan	Jumlah rapat koordinasi penilaian Adipura	6 kali rapat	94.047.300

No	Program	Kegiatan		Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3		4	5	6	7
		29.	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terlaksananya pengendalian lingkungan perkotaan	1. Jumlah hari tersedianya data kualitas udara ambien 2. Jumlah usaha/ kegiatan yang dipantau kualitas udara basementnya 3. Jumlah titik pemantauan kandungan logam berat di udara ambien	1. 365 hari (5 parameter), 2. 6 usaha/keg gedung/mall, 3. 1 titik pemantauan	669.292.128
		30.	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Terlaksananya pengendalian lingkungan perkotaan	1. Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan 2. Persentase pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM LH)	1. 20 usaha/ kegiatan 2. 100 %	186.576.400
		31.	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	Terlaksananya pengendalian lingkungan perkotaan	Data kinerja usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan (baik/buruk)	18 usaha/kegiatan	99.733.250
		32.	Koordinasi pengelolaan prokasi/superkasih	Terlaksananya pengendalian lingkungan perkotaan	Hasil inventaris sumber pencemaran	6 anak sungai	220.827.000
		33.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Terlaksananya pengendalian lingkungan perkotaan	Terlaksananya sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup	10 lokasi	375.450.000
8	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	34.	Pengendalian dampak perubahan iklim	Terlaksananya kegiatan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	Data dan Informasi tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kota Pekanbaru	1 Dokumen	76.339.000
		35.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Terlaksananya kegiatan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	Jumlah masyarakat yang ikut serta dalam perlindungan dan konservasi SDA	250 orang	204.467.200

No	Program	Kegiatan		Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3		4	5	6	7
9	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	36.	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Terlaksananya penyampaian akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Jumlah sekolah yang diberikan edukasi dan komunikasi di bidang lingkungan dan duta lingkungan yang terpilih	100 sekolah dan duta lingkungan	436.887.786
		37.	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Terlaksananya penyampaian akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Jumlah media pengembangan data dan informasi lingkungan	3 media : Dokumen Informasi Kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup (SLHD), Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung LH dan aplikasi Informasi izin Lingkungan	160.809.250
10	Program peningkatan pengendalian polusi	38.	Pengujian emisi kendaraan bermotor	Terlaksananya pengujian untuk pengendalian polusi dan limbah cair	1. Data hasil uji emisi gas buang kendaraan bermotor 2. Data hasil uji emisi sumber tidak bergerak (cerobong) kegiatan/usaha	1. 1 Laporan hasil uji pada Data 350 kendaraan 2. 1 laporan hasil uji pada Data 3 cerobong usaha/ keg	135.837.300
		39.	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Terlaksananya pengujian untuk pengendalian polusi dan limbah cair	1. Data Kualitas air Sungai Siak, Anak Sungai Siak dan danau di Kota Pekanbaru 2. Data Kualitas limbah cair rumah sakit, hotel, industri di Kota Pekanbaru 3. Data kualitas air sumur penduduk	1. 1 laporan hasil uji pada 18 titik air 2. 1 laporan hasil uji pada 18 titik tempat usaha 3. 1 laporan hasil uji pada Tiga kecamatan	188.439.200

		40.	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	Terlaksananya pengujian untuk pengendalian polusi dan limbah cair	Jumlah usaha/kegiatan yang mengikuti penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	200 orang	84.076.500
11	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	41.	Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan	Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas	2 Dokumen	39.914.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru perlu dijabarkan secara terukur, baik kuantitas maupun kualitasnya, untuk memperoleh gambaran pencapaian atas pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan tersebut (kinerja).

Secara umum, pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru tahun 2017 masih mencerminkan capaian atas *output* dari kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan. Namun demikian, terdapat pula sejumlah indikator kinerja yang sudah mencerminkan kinerja *outcome*. Adapun berdasarkan karakteristik tugas yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru, capaian *outcome* baru dapat terlihat pada tahun-tahun berikutnya.

Oleh karena itu, dalam rangka mengukur kinerja manfaat maka dalam laporan ini disajikan pula sejumlah indikator secara langsung ataupun tidak langsung dapat digunakan sebagai pendekatan untuk meninjau pengaruh kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru.

B. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017

Progres fisik kinerja kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru tahun 2017 sebanyak 41 (Empat puluh satu) kegiatan adalah sebesar 85,61 %. (tabel progres fisik dan keuangan terlampir).

Pada pengukuran kinerja tahun 2017 disajikan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagaimana yang tersaji dalam tabel Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Tahun 2017.

**TABEL TARGET DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN TAHUN 2017**

A. BELANJA LANGSUNG

No	Sasaran Strategis	Alokasi dana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	4	5	6
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.140.994.680	5.485.553.946	84.40
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	15.600.000	14.400.000	92,31
2	Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	429.520.000	257.904.678	60.04
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	3.303.686.725	3.083.783.335	93.34
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	957.424.947	869.367.002	90.80
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	61.817.500	56.055.000	90.68
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	127.272.479	108.416.000	85.18
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	453.403.455	373.127.000	82.29
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.312.240	6.308.000	99.93
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11.760.000	11.760.000	100
10	Penyediaan makanan dan minuman	164.956.000	98.471.000	59.70
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	609.241.334	605.961.931	99.46
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	585.850.064	539.809.420	92.14
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	161.471.889	131.920.000	81.70
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	74.378.175	69.950.000	94.05
3	Pengadaan Mebeleur	-	-	-
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	350.000.000	337.939.420	96.55
C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	213.782.302	213.782.302	100
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	213.782.302	213.782.302	100
D	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12.805.500	12.685.500	99.06
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.390.000	5.270.000	97.77
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	2.463.500	2.463.500	100

3	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	4.952.000	4.952.000	100
E	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	51.690.368.286	44.277.259.793	85.66
1	Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah	482.690.691	108.516.250	22.48
2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	343.176.700	330.462.600	96.30
3	Peningkatan operasi dari pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	42.502.797.108	36.309.958.678	85.43
4	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	959.530,300	870.325.300	90.70
5	Bimbingan Teknis persampahan	-	-	-
6	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	649.829.599	581.417.940	89.47
No	Sasaran Strategis	Alokasi dana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	4	5	6
7	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	220.708.050	199.043.700	90.18
8	Pengembangan dan penataan tempat pembuangan akhir sampah	6.531.635.847	5.877.535.325	89.99
G	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1.619.960.578	1.170.082.449	72.23
1	Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	94.047.300	79.785.700	84.84
2	Pemantauan Kualitas Lingkungan	669.292.128	580.669.575	86.76
3	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	160.570.900	99.019.424	61.67
4	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	99.733.250	49.655.250	49.79
5	Koordinasi pengelolaan prokasi/superkasih	220.827.000	19.452.000	8.81
6	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	375.450.000	341.500.500	90.96
H	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	56.739.000	55.139.000	97.18
1	Pengendalian dampak perubahan iklim	56.739.000	44.139.000	77.79
2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	-	-	-
I	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	353.744.200	307.034.600	86.80
1	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	192.934.950	160.315.600	83.09
2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	160.809.250	146.719.000	91.24
J	Program peningkatan pengendalian polusi	188.439.200	52.601.410	27.91
1	Pengujian emisi kendaraan bermotor	-	-	-

2	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	188.439.200	52.601.410	27.91
3	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	-	-	-
K	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			65.18
1	Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan	39.914.000	26.014.000	65.18
	JUMLAH	60.902.597.810	52.139.962.420	85.61

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

No	Sasaran Strategis	Alokasi dana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	4	5	6
1	Gaji dan Tunjangan	4.133.411.250	3.521.970.627	85.21
2	Tunjangan Penghasilan PNS	2.007.360.000	1.516.090.000	75.53
3	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	429.184.113	-	-
	JUMLAH	6.569.955.363	5.038.060.627	76.68

No	Sasaran Strategis	Alokasi dana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	4	5	6
A	BELANJA LANGSUNG (A)	60.902.597.810	52.139.962.420	85.61
B	BELANJA TIDAK LANGSUNG (B)	6.569.955.363	5.038.060.627	76.68
	JUMLAH	67.472.553.173	57.178.023.047	84.74

**TABEL CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN TAHUN 2017**

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PENANGG UNG JAWAB	2017	
			TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dokumen yang terkirim bermaterai	Dinas DLHK	Materai 3000 (200 buah) Materai 6000 (2500 buah)	Materai 3000 (200 buah) Materai 6000 (2500 buah)
	Komunikasi dan penerangan yang baik	Dinas DLHK	12 bulan	12 bulan
	Terlaksananya Kelancaran operasional kegiatan dinas	Dinas DLHK	1 buah mobil sweeper Road, 18 unit Roda 4, 16 Unit Roda 2,	1 buah mobil sweeper Road, 18 unit Roda 4, 16 Unit Roda 2,
	Kantor bersih nyaman dan indah	Dinas DLHK	44 Orang THL, 23 unit alat Kebersihan	44 Orang THL, 23 unit alat Kebersihan
	Peralatan kerja dapat dipergunakan	Dinas DLHK	114 unit	114 unit
	Kelancaran kerja	Dinas DLHK	47 jenis	47 jenis

	Dokumen dan surat dinas	Dinas DLHK	31 jenis	31 jenis
	Kelancaran kerja	Dinas DLHK	16 jenis	16 jenis
	Meningkatkan wawasan aparatur	Dinas DLHK	84 eksemplar	84 eksemplar
	Meningkatkan motivasi pegawai	Dinas DLHK	1 tahun	1 tahun
	Meningkatnya motivasi dan disiplin pegawai	Dinas DLHK	50 orang	50 orang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Lancarnya tugas kedinasan	Dinas DLHK	7 jenis	7 jenis
	Lancarnya tugas kedinasan	Dinas DLHK	18 unit	18 unit
	Lancarnya tugas kedinasan	Dinas DLHK	33 unit	33 unit
	Lancarnya tugas kedinasan	Dinas DLHK	1 unit	1 unit
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PNS yang mengikuti Bimtek	Dinas DLHK	20 orang	20 orang

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PENANGGUNG JAWAB	2017	
			TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan kinerja dan keuangan	Dinas DLHK	1 laporan	1 laporan
	Tersusunnya laporan keuangan	Dinas DLHK	1 laporan	1 laporan
	Tersusunnya laporan keuangan	Dinas DLHK	1 laporan	1 laporan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dokumen Rancangan Perda Retribusi Sampah	Dinas DLHK	1 Dokumen	1 Dokumen
	Tersedia dan terpeliharanya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Dinas DLHK	19 jenis bahan pembersih, 9 unit bahan baku bangunan, 11 stel pakaian kerja lapangan	19 jenis bahan pembersih, 9 unit bahan baku bangunan, 11 stel pakaian kerja lapangan
	Terlaksananya operasional penyapuan dan pengangkutan sampah	Dinas DLHK	1 kegiatan	1 kegiatan
	Tersedianya sarana pengelolaan persampahan berupa unit komposting	Dinas DLHK	1 set	1 set
	Terlaksananya bimbingan teknis untuk masyarakat	Dinas DLHK	120 orang	120 orang
	Terlaksananya sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah	Dinas DLHK	500 orang	500 orang

	kepada masyarakat			
	Terlaksananya perlombaan K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban) di tingkat Kelurahan se-Kota Pekanbaru serta terlaksananya kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional	Dinas DLHK	1 kegiatan	1 kegiatan
	Terlaksananya operasional pengelolaan TPA sampah	Dinas DLHK	1 kegiatan	1 kegiatan
Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah rapat koordinasi penilaian Adipura	Dinas DLHK	6 kali rapat	6 kali rapat
	1. Jumlah hari tersedianya data kualitas udara ambien 2. Jumlah usaha/ kegiatan yang dipantau kualitas udara basementnya 3. Jumlah titik pemantauan kandungan logam berat di udara ambien	Dinas DLHK	1. 365 hari (5 parameter), 2. 6 usaha/keg gedung/mall, 3. 1 titik pemantauan	1. 365 hari (5 parameter), 2. 6 usaha/keg gedung/mall, 3. 1 titik pemantauan
PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PENANGGUNG JAWAB	2017	
			TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
	1. Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan 2. Persentase pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM LH)	Dinas DLHK	1. 20 usaha/ kegiatan 2. 100 %	1. 20 usaha/ kegiatan 2. 100 %
	Data kinerja usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan (baik/buruk)	Dinas DLHK	18 usaha/kegiatan	18 usaha/ kegiatan
	Hasil inventaris sumber pencemaran	Dinas DLHK	6 anak sungai	6 anak sungai
	Terlaksananya sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup	Dinas DLHK	10 lokasi	10 lokasi
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Data dan Informasi tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kota Pekanbaru	Dinas DLHK	1 Dokumen	1 Dokumen
	Jumlah masyarakat yang ikut serta dalam perlindungan dan konservasi SDA	Dinas DLHK	250 orang	=
Program Peningkatan Kualitas dan	Jumlah sekolah yang diberikan edukasi dan komunikasi di bidang lingkungan dan duta lingkungan yang terpilih	Dinas DLHK	100 sekolah dan duta lingkungan	100 sekolah dan duta lingkungan

Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah media pengembangan data dan informasi lingkungan	Dinas DLHK	3 media : Dokumen Informasi Kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup (SLHD), Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung LH dan aplikasi Informasi izin Lingkungan	3 media : Dokumen Informasi Kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup (SLHD), Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung LH dan aplikasi Informasi izin Lingkungan
PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PENANGGUNG JAWAB	2017	
			TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
Program peningkatan pengendalian polusi	1. Data hasil uji emisi gas buang kendaraan bermotor 2. Data hasil uji emisi sumber tidak bergerak (cerobong) kegiatan/usaha	Dinas DLHK	1. 1 Laporan hasil uji pada Data 350 kendaraan 2. 1 laporan hasil uji pada Data 3 cerobong usaha/ keg	1. 1 Laporan hasil uji pada Data 350 kendaraan 2. 1 laporan hasil uji pada Data 3 cerobong usaha/ keg
	1. Data Kualitas air Sungai Siak, Anak Sungai Siak dan danau di Kota Pekanbaru 2. Data Kualitas limbah cair rumah sakit, hotel, industri di Kota Pekanbaru 3. Data kualitas air sumur penduduk	Dinas DLHK	1. 1 laporan hasil uji pada 18 titik air 2. 1 laporan hasil uji pada 18 titik tempat usaha 3. 1 laporan hasil uji pada Tiga kecamatan	1. 1 laporan hasil uji pada 18 titik air 2. 1 laporan hasil uji pada 18 titik tempat usaha 3. 1 laporan hasil uji pada Tiga kecamatan
	Jumlah usaha/kegiatan yang mengikuti penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	Dinas DLHK	200 orang	-
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas	Dinas DLHK	2 Dokumen	2 Dokumen

Tabel Pengukuran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017 (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Dokumen yang terkirim bermaterai	Materai 3000 (200 buah) Materai 6000 (2500 buah)	Materai 3000 (200 buah) Materai 6000 (2500 buah)	100.00 %
2	Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Komunikasi dan penerangan yang baik	12 bulan	12 bulan	100.00 %
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Terlaksananya Kelancaran operasional kegiatan dinas	1 buah mobil sweeper Road, 18 unit Roda 4, 16 Unit Roda 2,	1 buah mobil sweeper Road, 18 unit Roda 4, 16 Unit Roda 2,	100.00 %
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor bersih nyaman dan indah	44 Orang THL, 23 unit alat Kebersihan	44 Orang THL, 23 unit alat Kebersihan	100.00 %
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peralatan kerja dapat dipergunakan	114 unit	114 unit	100.00 %
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kelancaran kerja	47 jenis	47 jenis	100.00 %
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dokumen dan surat dinas	31 jenis	31 jenis	100.00 %
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelancaran kerja	16 jenis	16 jenis	100.00 %
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatkan wawasan aparatur	84 eksemplar	84 eksemplar	100.00 %
10	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatkan motivasi pegawai	1 tahun	1 tahun	100.00 %
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Meningkatnya motivasi dan disiplin pegawai	50 orang	50 orang	100.00 %

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017 (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
12	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Lancarnya tugas kedinasan	7 jenis	7 jenis	100.00 %
13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Lancarnya tugas kedinasan	18 unit	18 unit	100.00 %
14	Pengadaan Mebeleur	Lancarnya tugas kedinasan	33 unit	33 unit	100.00 %
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Lancarnya tugas kedinasan	1 unit	1 unit	100.00 %
16	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pemahaman PNS	20 orang	20 orang	100.00 %
17	Penyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan kinerja dan keuangan	1 laporan	1 laporan	100.00 %
18	Penyusun laporan keuangan semeseteran	Tersusunya laporan keuangan	1 laporan	1 laporan	100.00 %
19	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunya laporan keuangan	1 laporan	1 laporan	100.00 %
20	Penyusunan Kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Dokumen Rancangan Perda Retribusi Sampah	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %
21	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Tersedia dan terpeliharanya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	19 jenis bahan pembersih, 9 unit bahan baku bangunan, 11 stel pakaina kerja lapangan	19 jenis bahan pembersih, 9 unit bahan baku bangunan, 11 stel pakaina kerja lapangan	100.00 %
22	Peningkatan operasi dari pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terlaksananya operasional penyapuan dan pengangkutan sampah	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00 %
23	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	Tersedianya sarana pengelolaan persampahan berupa unit komposting	1 set	1 set	100.00 %

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017 (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
24	Bimbingan Teknis persampahan	Terlaksananya bimbingan teknis untuk masyarakat	120 orang	120 orang	100.00 %
25	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Terlaksana sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah kepada masyarakat	500 orang	500 orang	100.00 %
26	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Terlaksananya perlombaan K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban) di tingkat Kelurahan se-Kota Pekanbaru serta terlaksananya kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00 %
27	Pengembangan dan penataan tempat pembuangan akhir sampah	Terlaksananya operasional pengelolaan TPA sampah	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00 %
28	Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	Jumlah rapat koordinasi penilaian Adipura	6 kali rapat	6 kali rapat	100.00 %
29	Pemantauan Kualitas Lingkungan	1. Jumlah hari tersedianya data kualitas udara ambien 2. Jumlah usaha/ kegiatan yang dipantau kualitas udara basementnya 3. Jumlah titikpemantauan kandungan logam berat di udara ambien	1. 365 hari (5parameter), 2. 6 usaha/keg gedung/mall, 3. 1 titik pemantauan	1. 365 hari (5parameter), 2. 6 usaha/keg gedung/mall, 3. 1 titik pemantauan	100.00 %
30	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	1. Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukanpengawasan 2. Persentase pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM LH)	1. 20 usaha/kegiatan 2. 100 %	1. 20 usaha/kegiatan 2. 100 %	100.00 %
31	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	Data kinerja usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan (baik/buruk)	18 usaha/kegiatan	18 usaha/kegiatan	100.00 %

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017 (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
32	Koordinasi pengelolaan prokasi/superkasih	Hasil inventaris sumber pencemaran	6 anak sungai	6 anak sungai	100.00 %
33	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Terlaksananya sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup	10 lokasi	10 lokasi	100.00 %
34	Pengendalian dampak perubahan iklim	Data dan Informasi tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kota Pekanbaru	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %
35	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Jumlah masyarakat yang ikut serta dalam perlindungan dan konservasi SDA	250 orang	-	0 %
36	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah sekolah yang diberikan edukasi dan komunikasi di bidang lingkungan dan duta lingkungan yang terpilih	100 sekolah dan duta lingkungan	100 sekolah dan duta lingkungan	100.00 %
37	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah media pengembangan data dan informasi lingkungan	3 media : Dokumen Informasi Kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup (SLHD), Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung LH dan aplikasi Informasi izin Lingkungan	3 media : Dokumen Informasi Kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup (SLHD), Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung LH dan aplikasi Informasi izin Lingkungan	100.00 %
38	Pengujian emisi kendaraan bermotor	1. Data hasil uji emisi gas buang kendaraan bermotor 2. Data hasil uji emisi sumber tidak bergerak (cerobong) kegiatan/usaha	1. 1 Laporan hasil uji pada Data 350 kendaraan 2. 1 laporan hasil uji pada Data 3 cerobong usaha/ keg	1. 1 Laporan hasil uji pada Data 350 kendaraan 2. 1 laporan hasil uji pada Data 3 cerobong usaha/ keg	100.00 %

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017 (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
39	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	1. Data Kualitas air Sungai Siak, Anak Sungai Siak dan danau di Kota Pekanbaru 2. Data Kualitas limbah cair rumah sakit, hotel, industri di Kota Pekanbaru 3. Data kualitas air sumur penduduk	1. 1 laporan hasil uji pada 18 titik air 2. 1 laporan hasil uji pada 18 titik tempat usaha 3. 1 laporan hasil uji pada Tiga kecamatan	1. 1 laporan hasil uji pada 18 titik air 2. 1 laporan hasil uji pada 18 titik tempat usaha 3. 1 laporan hasil uji pada Tiga kecamatan	100.00 %
40	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	Jumlah usaha/kegiatan yang mengikuti penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	200 orang	0	0 %
41	Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan	Jumlah Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %

a. Kendala Yang Dihadapi

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja, kami menyadari bahwa pencapaian tingkat kinerja belum maksimal. Hal ini disebabkan adanya beberapa kendala, antara lain:

1. Re-organisasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
2. Masih rendah dan terbatasnya kualitas sumberdaya aparatur baik perencana dan teknis dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan;
3. Minimnya sarana dan prasarana persampahan (Armada, TPS, TPST).
4. Beberapa kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tidak dilaksanakan dikarenakan terjadi rasionalisasi anggaran.

C. Strategi percepatan pelaksanaan penyerapan anggaran, antara lain:

1. Persiapan Pelaksanaan Anggaran Lebih Awal;

- PPK segera meneliti kembali RKA DPA yang telah diterima dan apabila diketahui terdapat kesalahan agar segera diajukan revisinya
- PPK Mengidentifikasi jenis-jenis belanja yang pengadaannya melalui proses lelang (tender), pengadaan/penunjukan langsung, swa-kelola

2. Percepatan Penyerapan Anggaran;

- Menyusun Rencana Penyerapan Anggaran (*disbursement plan*) yang disertai dengan rencana pengadaan (*procurement plan*) yang sistematis;
- Segera mulai melakukan proses tender, bagi yang belum melaksanakannya;
- Segera membuat petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan apabila diperlukan;
- Meningkatkan kemampuan SDM pengelola perbendaharaan;
- Mempercepat proses pembayaran terhadap pekerjaan yang telah selesai/termin yang telah dipenuhi.
- Merencanakan revisi alokasi untuk menutupi kekurangan anggaran bila perlu.

3. Strategi Pencapaian Output/Kinerja

- Pengeluaran diarahkan untuk pencapaian *output* yang jelas dan terukur;
- Output yang dihasilkan dapat dinilai dengan indikator keluaran kegiatannya;
- Pencapaian *output* harus mendukung *outcome* yang diharapkan;
- Peningkatan Kualitas Belanja;
- Mengutamakan pencapaian output/kinerja, dibandingkan menghabiskan anggaran belanja.

4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

- Menetapkan target bulanan/triwulanan capaian output/kinerja;
- Mengupayakan keselarasan penyerapan belanja dan capaian output/kinerja;
- Melakukan pembinaan dan pendampingan bagi unit yang kinerja keuangan dan outputnya tidak mencapai target;
- Mencegah terulangnya kembali kinerja yang tidak optimal ditahun yang lalu.
- Membentuk helpdesk pelaksanaan anggaran dengan melibatkan unit pengawasan internal;
- Unit pengawasan internal melakukan pembinaan dan pengawasan sejak awal tidak hanya post audit.

5. Pertanggung-jawaban Keuangan dan Kinerja

- Melaksanakan penatausahaan belanja dan capaian kinerja;
- Menyusun laporan keuangan dan kinerja

D. PENGUKURAN KINERJA ANGGARAN TAHUN 2017

Pada tahun anggaran 2017 OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2017 berjumlah **Rp. 67.472.553.173,00-** terdiri dari :

1. Belanja Langsung **Rp 60.902.597.810,00-**
2. Belanja Tidak Langsung **Rp. 6.569.955.363,00-**

Dari anggaran tersebut diatas terealisasi sampai dengan akhir tahun 2017 sebesar **Rp. 57.178.023.047,00-** (84,74%) , - terdiri dari :

1. Belanja Langsung **Rp. 52.139.962.420,00-**
2. Belanja Tidak Langsung **Rp. 5.038.060.627,00-**

Terhadap realisasi anggaran yang hanya sebesar 84,74 %. Sedangkan Terhadap realisasi fisik yang hanya sebesar 90 %.